

Analisis pengaruh investasi swasta, Belanja modal, dan upah minimum kota (umk) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam

Hana Zalfa Salsabila¹, Is Susanto²,
Taufiqur Rahman³

Program Studi Ekonomi
Syariah^{1 2 3} Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam¹²³ UIN Raden
Intan Lampung¹²³

Hanazalfa212@gmail.com¹,
issusanto@radenintan.ac.id²,
taufiqur@radenintan.ac.id³

Received: 2024-11-02. **Revised:** 2024-12-20. **Accepted:** 2024-12-21.

Issue Period: Vol.9 No.1 (2025), Pp. 54-73

Abstrak: Penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu tantangan utama dalam perkembangan ekonomi daerah. Untuk mencapai penyerapan tenaga kerja yang optimal, hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan investasi dari sektor swasta dan pemerintah berupa belanja modal serta upah minimum kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh investasi swasta, belanja modal, dan upah minimum kota (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda yang menggunakan software SPSS 25. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data time series dalam rentan waktu 11 tahun mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2023. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa hanya variabel belanja modal saja yang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan investasi swasta dan upah minimum kota berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian secara Bersama-sama menunjukkan bahwa investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung. Dalam perspektif ekonomi Islam mengenai investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam karena didasarkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Investasi Swasta; Belanja Modal; Upah Minimum Kota, Penyerapan Tenaga Kerja.

Abstract: Labor absorption is one of the main challenges in regional economic development. To achieve optimal labor absorption, this can be done through increased investment from the private sector and government in the form of capital expenditure and city minimum wage. This study aims to analyze the effect of private investment, capital expenditure, and city minimum wage (UMK) on employment in Bandar Lampung City in the perspective of Islamic economics. This type of research is quantitative research with multiple linear regression analysis methods using SPSS 25 software. The data used in this study are secondary data in the form of time series data within 11 years starting from 2013 to 2023. The results of this study partially show that only the capital expenditure variable has an insignificant negative effect on



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

labor absorption while private investment and city minimum wage have a significant positive effect on labor absorption. Then together show that private investment, capital expenditure and city minimum wage together have a positive and significant effect on employment in the city of Bandar Lampung. In the perspective of Islamic economics regarding private investment, capital expenditure and city minimum wage on labor absorption in Bandar Lampung city is in accordance with the principles of Islamic economics because it is based on the welfare of the community.

Keywords: Private Investment; Capital Expenditure; City Minimum Wage, Labor Absorption.

I. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi di Negara Berkembang, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu indikatornya adalah dengan memperluas peluang kerja. Keberhasilan dalam mencapai tingkat kesejahteraan dapat diukur dari kapasitas negara dalam mengatasi berbagai tantangan, salah satunya Tingkat pengangguran yang tinggi. Dalam hal ini, salah satu faktor utama dalam mendorong Pembangunan ekonomi yang inklusif adalah penyerapan tenaga kerja yang optimal, yang pada gilirannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata[1].

Selain menjadi faktor kunci dalam pembangunan ekonomi suatu negara, tenaga kerja dapat menyebabkan sejumlah masalah yang signifikan, seperti tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan jumlah angkatan kerja, kualitas tenaga kerja yang rendah, dan lainnya. Ketika masalah-masalah ini muncul di suatu negara, proses pembangunan di negara tersebut dapat terhambat. maka, peran pemerintah sangat penting dalam menangani masalah-masalah tersebut.[2] Dengan demikian pertambahan jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan kesempatan kerja dapat meningkatkan tingkat pengangguran, yang selanjutnya dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan, kejahatan, dan fenomena sosial-ekonomi lainnya dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, diantara semua agama di dunia, Islam merupakan agama yang sangat mengutamakan pentingnya bekerja dan berusaha yang menjadi bagian penting dari kehidupan. Harta yang diperoleh tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti berinfak, membayar zakat, menunaikan ibadah hajim berjihad dan lain sebagainya[3].

Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S At-taubah ayat 105[4]

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
﴿١٠٥﴾ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Q.S At-taubah ayat 105)[4]

Surah At-Taubah ayat 105 menjabarkan mengenai pentingnya bekerja. Faktor yang memengaruhi kebahagiaan adalah bekerja untuk dunia dan akhirat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Allah SWT selalu melihat pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, baik perbuatan itu dilakukan secara rahasia ataupun terang-terangan. Allah SWT juga mengetahui niat dan tujuan dari suatu pekerjaan. Bukan hanya itu, perbuatan yang dilakukan juga akan diketahui oleh Rasul-Nya dan seluruh kaum muslimin. Pekerjaan yang dilakukan seseorang akan diketahui keikhlasannya. Pada hari kiamat semua itu akan diketahui dan semua perbuatan akan diberi balasan. Perbuatan atau amal yang baik akan dibalas dengan pahala, sedangkan amal yang buruk akan memperoleh siksa[5].

Faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan proses pembangunan, termasuk di antaranya para pekerja, terutama dalam populasi keseluruhan penduduk kota Bandar Lampung secara umum. Tabel dibawah ini merupakan daftar statistik penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung selama periode 2013-2023.

Tabel 1. Angkatan Kerja, dan Angkatan Kerja Bekerja di Kota Bandar Lampung 2013-2023



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Tahun	Angkatan Kerja	Angkatan Kerja Bekerja	Presentase Peningkatan
2013	397648	362000	-
2014	420261	385417	0,67%
2015	445064	407190	-0,2%
2016	455065	426003	2,1%
2017	476469	437884	-1,7%
2018	504849	468121	0,8%
2019	511686	475244	0,2%
2020	554224	505483	-1,7%
2021	560107	510511	-0,1%
2022	567038	522166	0,9%
2023	608229	563037	0,5%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

Merujuk pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja dan Angkatan kerja bekerja di kota Bandar Lampung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami angka yang fluktuatif. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jika diseusikan antara pertumbuhan angkatan kerja bekerja dengan jumlah angkatan kerja yang ada di setiap tahunnya, tahun 2016 merupakan peningkatan Angkatan kerja bekerja paling tinggi, yang kemudian dalam jumlah Angkatan kerja bekerja setelah tahun 2016 tersebut terus berfluktuasi dan tidak kembali mencapai puncaknya seperti pada tahun 2016. Angka penyerapan angkatan kerja bekerja yang berfluktuasi ini bisa menandakan adanya masalah dalam penyerapan tenaga kerja, seperti pertumbuhan angkatan kerja baru yang lebih cepat dibanding dengan peluang kerja tersedia.

Dengan demikian, kota Bandar Lampung juga tidak terlepas untuk menghadapi tantangan dalam bidang ketenagakerjaan, di mana jumlah angkatan kerja terus meningkat setiap tahun akibat pertumbuhan penduduk, namun peluang kerja yang terbatas. Dampaknya, tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi Lampung.

Penyediaan modal merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan pembangunan, yang sering kali diwujudkan melalui investasi.[6] Menurut pandangan Harrod-Domar, terdapat korelasi positif antara investasi dan penyerapan tenaga kerja, di mana peningkatan investasi berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.[7] Sejalan dengan ini, merujuk pernyataan Sukirno, faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja, salah satunya merupakan jumlah modal atau investasi yang tersedia. Investasi memfasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi dan peluang kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran.[8]

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan beberapa masalah di kota Bandar Lampung. masalah ini menyebabkan ketidakstabilan perekonomian dalam hal tingkat pengangguran yang tidak dapat diprediksi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, dalam hal ini investasi merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru. Peningkatan investasi swasta baik PMDN maupun PMA dilakukan dengan tujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran di Bandar Lampung.

Investasi yang tepat sasaran akan membuka peluang untuk peningkatan peluang kerja, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ini kemudian akan menguatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, para pengusaha akan terdorong untuk memperbesar skala produksi mereka dengan memperluas skala perusahaan, seperti dengan menambah bahan baku, tenaga kerja, atau berbagai faktor produksi lainnya.[9]

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam berbagai aspek UU No. 32 Tahun 2004 mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

selaras.[10]

Pemberian wewenang ini kepada setiap daerah membuka peluang bagi para penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk mengalirkan modal mereka ke Kota Bandar Lampung. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera dan menjadi pusat perdagangan dan jasa di wilayah ekonomi Sumatera Bagian Selatan. Potensi ini menjadikan Kota Bandar Lampung menarik bagi investor yang berharap mendapatkan keuntungan dari penanaman modal, mengingat perkembangan Kota Bandar Lampung yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu mendorong masyarakatnya untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi-potensi lokal mereka agar menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Hal ini akan berdampak pada peningkatan investasi sehingga menghasilkan perusahaan baru yang berkapasitas untuk membuka lapangan kerja lebih besar atau dalam jumlah yang besar.

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Proyek PMDN dan PMA di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2023

Tahun	PMDN (Rp)			PMA (US\$)		
	Jumlah Investasi	Jumlah Perusahaan	Peningkatan investasi (%)	Jumlah Investasi	Jumlah Perusahaan	Peningkatan investasi (%)
2013	720.850.332.398	45	-	312.243.578	51	-
2014	750.430.332.398	59	4%	330.398.578	55	6%
2015	877.285.379.135	64	17%	351.902.324	59	7%
2016	947.403.951.906	68	8%	428.326.554	61	22%
2017	1.033.079.524.677	75	9%	507.465.016	65	18%
2018	1.474.176.024.677	98	43%	520.769.714	77	3%
2019	1.922.222.324.677	172	30%	606.031.814	135	16%
2020	2.210.330.624.677	563	15%	630.598.514	293	4%
2021	3.480.180.424.677	1.368	57%	706.294.714	449	12%
2022	5.009.521.724.677	2.142	44%	881.238.814	630	25%
2023	7.454.783.824.677	4.150	49%	960.800.314	995	9%

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung (Data Diolah)

Merujuk pada tabel 2 Perkembangan Investasi di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun ke tahun mengalami angka yang fluktuatif, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 57% dari tahun sebelumnya, sebesar 1,269,849,800,000 Dan kembali menurun di 2022. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan angkatan kerja bekerja, tahun 2021 mengalami penurunan 0,1% dari tahun sebelumnya. Pada penanaman modal asing juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun peningkatan jumlah penanaman modal asing mengalami angka fluktuatif, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 25% dari tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 174,944,100 dan kembali menurun ditahun 2023 hanya mengalami oeningkatan sebesar 9%.

Penelitian Investasi Swasta yang dilakukan oleh Sri Wahyuny Mustafa[11], menunjukkan bahwa Investasi Swasta mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sakti, Muhammad Saleh, Juliansyah[12], menunjukkan bahwa Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa peningkatan pada nilai investasi Swasta belum tentu berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selain melalui investasi swasta, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja diantaranya melalui kebijakan pengeluaran untuk infrastruktur, aset tetap dan aset lainnya. Porsi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal yang bertujuan untuk penunjang investasi daerah. Belanja modal merupakan salah satu komponen dari belanja daerah yang telah ditetapkan dalam APBD suatu daerah. Belanja modal bisa didefinisikan sebagai investasi yang berupa pengadaan/pembelian aset yang bermanfaat



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat.[13]

Tabel 3. Realisasi belanja modal Kota Bandar Lampung 2013-2023

Tahun	Belanja modal (Milyar)
2013	399,44
2014	354,19
2015	245,17
2016	199,20
2017	503,28
2018	425,20
2019	310,73
2020	263,72
2021	400,78
2022	424,75
2023	322,66

Sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 3 dapat terlihat bahwa jumlah belanja modal di kota Bandar Lampung mulai tahun 2013 sampai tahun 2023 mengalami angka yang fluktuatif. Belanja modal tertinggi di kota Bandar Lampung pada tahun 2017 sebesar 503,28 Milyar. Selain tertinggi, tahun 2017 juga mengalami peningkatan jumlah sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 304,08 Milyar. Sedangkan dilihat dari kondisi peningkatan jumlah angkatan kerja bekerja dari tahun sebelumnya, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,7%. Sedangkan realisasi belanja modal paling sedikit terjadi di tahun 2016 yaitu 199,20 M, yang jika disesuaikan dengan penyerapan tenaga kerja yang terjadi di 2016 peningkatan tenaga kerja terjadi sebesar 2,1% yang Dimana tahun tersebut merupakan penyerapan tenaga kerja paling optimal dari tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. dalam hal ini dapat terlihat pada peningkatan dan penurunan belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja terjadi ketidaksesuaian pada teori.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Didin Fatihudin[14], menunjukkan Peningkatan belanja modal dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Rizki Kenraraswati, M. Syurya Hidayat, Yohanes Vyn Amzar[15], hasil penelitian menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka dapat disimpulkan belanja modal belum tentu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung.

Penyerapan tenaga kerja dalam konteks permintaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat upah. Kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja yaitu dengan kebijakan penetapan upah minimum. Upah sebagaimana yang dikemukakan keynes dalam teorinya berpendapat bahwa pasar tenaga kerja tidak berfungsi seperti yang dijelaskan dalam teori klasik. Pekerja biasanya tergabung dalam serikat buruh yang berusaha melindungi upah agar tidak turun. Meskipun ada kemungkinan penurunan upah, Keynes berpendapat ini jarang terjadi. Dalam hal ini Keynes menyatakan terdapat hubungan positif antara upah dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi pada saat upah naik maka pendapatan masyarakat akan meningkat. Dengan demikian daya beli masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Pada saat daya beli meningkat maka konsumsi akan meningkat juga sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya. Pada saat itu, perusahaan harus meningkatkan faktor produksinya salah satunya tenaga kerja sehingga akan terjadi penyerapan tenaga kerja.[16]

Tabel 4. Upah Minimum Kota Bandar Lampung 2013-2023

Tahun	Upah Minimum
2013	1.165.000
2014	1.422.500



2015	1.649.500
2016	1.870.000
2017	2.054.365
2018	2.263.391
2019	2.445.141
2020	2.653.223
2021	2.739.983
2022	2.770.794
2023	2.991.349

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

Dalam daftar tabel 4 dapat dilihat bahwa upah minimum di kota Bandar Lampung mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan, Namun peningkatan upah minimum paling signifikan terjadi di tahun 2014, jika disesuaikan dengan data angkatan kerja bekerja, tahun 2014 angkatan kerja bekerja mengalami peningkatan hanya 0,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan peningkatan paling sedikit pada tahun 2022 sebesar 1% dari tahun sebelumnya, jika disesuaikan dengan data angkatan kerja bekerja 2022 mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,9%.

Upah minimum ini memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nur Kusmiati Taufan, Ade Yunita Mafruhah[17], yang menyebutkan bahwa UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Adapun penelitian yang bertolak belakang sebagaimana penelitian dari Muhammad Sakti, Muhammad Saleh, Juliansyah[12], yang berkesimpulan dimana upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Maka dari kedua hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa upah minimum kota belum tentu memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung.

Dari uraian tersebut, terdapat suatu permasalahan yang menarik untuk di teliti lebih lanjut mengenai pengaruh investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi islam tahun 2013-2023, dan penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian: **“Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Modal, Dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2013-2023”**.

II. METODE DAN MATERI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Harrod-domar

Harrod-Domar adalah ahli ekonomi yang mengembangkan analisis Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal/investasi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Investasi memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja. Untuk menjalankan suatu usaha, selain modal yang ditanamkan, juga diperlukan tenaga kerja. Harrod-Domar menjelaskan bahwa kegiatan investasi dalam suatu perekonomian memiliki potensi untuk mempengaruhi fluktuasi tingkat perekonomian negara, karena dapat mendorong peningkatan produksi dan menciptakan peluang kerja baru.[18]

Dalam kerangka Teori Harrod-Domar, pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi perekonomian, tetapi juga mendorong permintaan efektif di masyarakat. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik sebagai sumber pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Peningkatan investasi menciptakan lapangan kerja baru, yang membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menurunkan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.[19] Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, investasi baru diperlukan untuk meningkatkan akumulasi modal. Dampak langsungnya, sektor-sektor yang menerima investasi baru akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga investasi tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga membantu penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.[20]



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

2.1.2 Teori Makroekonomi Keynesian

Teori Ekonomi Keynesian, yang juga dikenal sebagai Keynesianisme, dikembangkan oleh ekonom Inggris, John Maynard Keynes, melalui karya utamanya *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Teori ini menekankan pentingnya permintaan agregat dalam perekonomian dan bagaimana campur tangan pemerintah dapat membantu menstabilkan ekonomi. Secara umum, Total pembelanjaan agregat pada suatu waktu sering kali lebih kecil dari yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi semua orang yang ingin bekerja. Agar semua orang bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga pembelanjaan agregat harus ditingkatkan hingga mencapai tingkat yang cukup. diperlukan intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk meningkatkan pengeluaran agregat, dengan kebijakan fiskal sebagai langkah utama. Kebijakan ini mengelola anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah.[21]

Keynes mengusulkan langkah yang perlu diambil adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dalam teorinya, Keynes berpendapat bahwa investasi mempengaruhi peningkatan stok modal dan Tingkat pertumbuhan output seharusnya sejalan dengan tingkat permintaan agregat, yang jika tidak tercapai, dapat menghambat laju pertumbuhan output, yang akan berdampak juga pada penurunan kesempatan kerja. Pengeluaran pemerintah ini bertujuan untuk mengimbangi konsumsi dan investasi, sehingga mampu mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja.[22] Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah yang memberikan manfaat jangka panjang salah satunya adalah belanja modal. Belanja tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik, yang pada gilirannya dapat menciptakan peluang kerja. Seperti pembangunan jalan penghubung (darat, laut, udara), komunikasi, energi, dan lainnya, yang dimana hal ini akan diikuti dengan menarik para penanam modal untuk menanamkan modal di daerah tersebut, dengan harapan bahwa peningkatan investasi akan mendorong terbentuknya perusahaan baru yang akan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. [23]

Disamping hal itu, penyerapan tenaga kerja erat kaitannya dengan tingkat upah, dimana Keynes berpendapat bahwa pasar tenaga kerja tidak berfungsi seperti yang dijelaskan dalam teori klasik. Pekerja biasanya tergabung dalam serikat buruh yang berusaha melindungi upah agar tidak turun. Meskipun ada kemungkinan penurunan upah, Keynes berpendapat ini jarang terjadi. Terlindunginya upah pekerja, ini akan berdampak pada pendapatan Masyarakat yang meningkat sehingga diikuti daya beli masyarakat yang meningkat juga, artinya hal ini akan meningkatkan tingkat konsumsi Masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya. Sehingga, perusahaan harus meningkatkan faktor produksinya yang salah satunya adalah tenaga kerja, dalam hal ini akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Jika upah turun, pendapatan masyarakat akan berkurang, yang mengurangi daya beli dan akhirnya menurunkan konsumsi. Penurunan konsumsi ini akan menurunkan harga dan output barang.[16] Sehingga Keynes berpendapat bahwa terdapat hubungan positif antara upah dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Maka kenaikan upah akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli. Peningkatan daya beli ini mendorong konsumsi, sehingga produsen perlu meningkatkan produksi mereka. Untuk itu, perusahaan harus menambah faktor produksi, termasuk tenaga kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.1.3 Penyerapan tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja merujuk pada jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam suatu sektor atau unit usaha, yang terjadi sebagai akibat dari permintaan akan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pembicaraan tentang ketenagakerjaan tidak terlepas dari masalah kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Tenaga kerja merupakan individu yang bekerja dalam proses produksi, dianggap sebagai lebih dari sekadar faktor produksi, namun juga sebagai individu yang dihargai serta mendapat hak yang layak, diberi kompensasi yang disepakati dengan sukarela oleh kedua belah pihak, dengan tanggung jawab dan amanah untuk menjalankan tugas dengan optimal.[24]

2.1.4 Investasi Swasta

Investasi swasta atau penanaman modal adalah penempatan sejumlah modal yang berasal dari perusahaan



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

atau swasta yang kemudian akan berdampak pada peningkatan stok modal, yang pada pemanfaatannya digunakan untuk membangun usaha baru dan melakukan perbaikan atau pemeliharaan pada Perusahaan atau usaha yang telah berjalan. Yang dampaknya akan menimbulkan beberapa keuntungan antara lain: meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.[25] Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi 2 yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Penanaman Modal Asing adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri.[26] Penanaman modal dalam negeri adalah aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha serta dana yang bersumber dari dalam negeri dengan tujuan membangun, mengoprasikan dan menambahkan stok modal usaha dalam negeri[27]

2.1.5 Belanja modal

Belanja modal merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh atau meningkatkan aset yang memiliki manfaat jangka panjang, lebih dari satu tahun anggaran. Pengeluaran ini digunakan untuk investasi dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, yang dapat menambah nilai dan kekayaan daerah. Dengan demikian, belanja modal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aset yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik di masa depan serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja[28] Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan modal yang bertujuan menambah aset tetap atau aset lainnya dengan manfaat yang melampaui satu periode akuntansi. Termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang berfungsi memperpanjang atau meningkatkan masa manfaat, kapasitas, serta kualitas asset.[29]

2.1.6 Upah minimum

Upah adalah salah satu aspek yang mempengaruhi motivasi serta efisiensi tenaga kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas output yang dihasilkan. Upah yang adil merupakan upah yang sesuai dengan standar pengupahan yang ditetapkan pemerintah. [30] Di Indonesia, penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Kebutuhan hidup layak merujuk pada kebutuhan seorang pekerja/ buruh untuk mendapatkan hidup layak yang memadai dalam sebulan.[31]

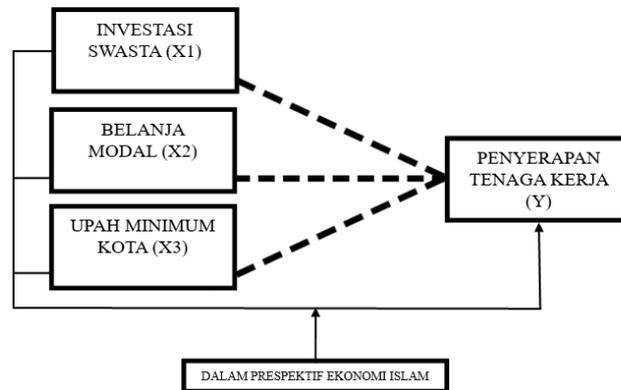
2.2 Hipotesis

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan, hipotesis dirumuskan menjadi:

1. Diduga investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di bandar Lampung tahun 2013-2023.
2. Diduga belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bandar Lampung tahun 2013-2023.
3. Diduga upah minimum kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bandar Lampung tahun 2013-2023.
4. Investasi swasta, investasi publik, tingkat pendidikan, umk secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung tahun 2013-2023.



Gambar 1. Kerangka Konsep



Keterangan :

..... Secara Parsial

———— Secara Bersama-sama

2.3 Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *Time series* atau kurun waktu mulai dari tahun 2013-2023 yang bersifat asosiatif. Metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis.[32] Data kuantitatif terdiri dari investasi swasta, belanja modal, upah minimum kota dan penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung tahun 2013-2023. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas (independen) yaitu Investasi Swasta, belanja modal, Upah Minimum Kota (x) terhadap variabel terikat (dependen) yaitu Penyerapan Tenaga Kerja (y). Pengujian sampel menggunakan software SPSS25 dan menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dilanjutkan uji hipotesis pada uji-t, uji-f dan uji koefisien determinasi (R²).

Populasi adalah seluruh subjek penelitian yang dapat berupa manusia atau benda yang dapat berkontribusi untuk memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yang dapat dipelajari dan kemudian dapat diambil kesimpulannya.[33] Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh berdasarkan periode waktu tertentu pada Investasi swasta (PMA, PMDN), Belanja Modal, upah minimum kota dan penduduk 15+ yang bekerja di Kota Bandar Lampung pada tahun 2013-2023. yang telah dipublikasikan oleh Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung dan BPS Kota Bandar Lampung dan Kemenkeu. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah simple jenuh yaitu dimana seluruh jumlah anggota populasi dilibatkan sebagai sampel penelitian.[32] yaitu data tahunan periode 2013-2023 dengan total 11 sampel.

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.[34] Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder dengan jenis data time series. Data bersumber dari Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung dan BPS Kota Bandar Lampung, web resmi Kemenkeu, perpustakaan, dan sumber-sumber lainnya seperti jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Data yang digunakan adalah Jumlah Penduduk 15+ yang Bekerja, PMA Dan PMDN, Realisasi Belanja Modal Pemerintah, Serta Upah Minimum Kota Bandar Lampung.



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji selanjutnya, pengujian ini digunakan uji one sample kolmogrovsmirnov. Data yang dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan kolmogrof-smirnov terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01190400
Most Extreme Differences	Absolute	.163
	Positive	.163
	Negative	-.140
Test Statistic		.163
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : SPSS 25 data diolah tahun 2024

Merujuk pada tabel 5 dapat dilihat hasil uji normalitas menggunakan metode one sample kolmogrov-smirnov yang dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari variabel independen dan variabel dependen pada jumlah (N) sebesar 11 adalah 0,200. Berarti data dari penelitian ini berdistribusi normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau $0,200 > 0,05$, sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

3.1.2 Uji Multikolinieritas

Data yang digunakan dalam penelitian ini harus terbebas dari gejala multikolinieritas, gejala ini ditunjukkan dengan korelasi antar variabel independen. Pengujian dalam uji multikolinieritas ditentukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) harus berada dibawah 10.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1	(Constant)		
	Investasi Swasta	,113	8,887
	Belanja Modal	,906	1,104
	Upah Minimum Kota	,115	8,683
a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja			

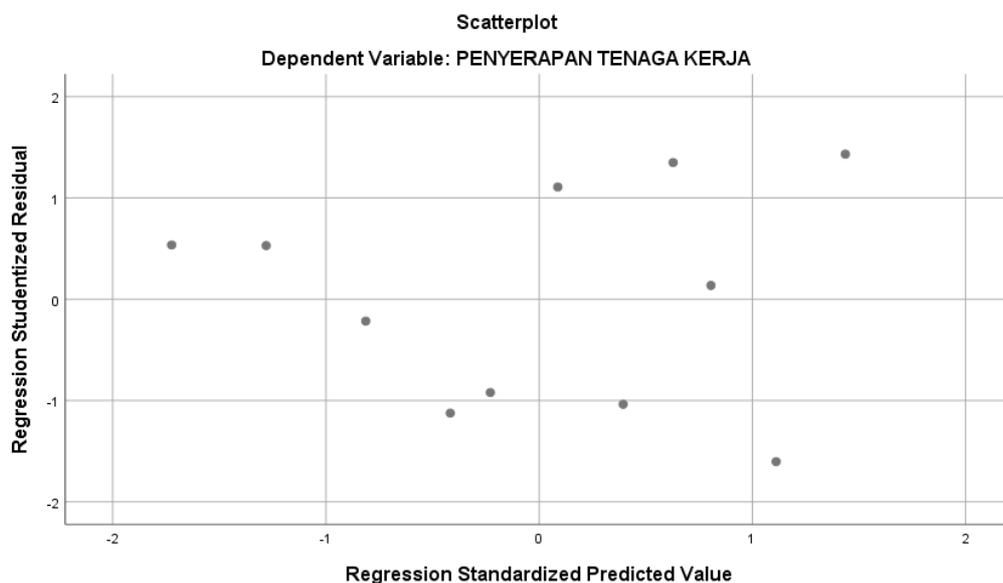
sumber : SPSS 25 data diolah tahun 2024

Berdasarkan pada tabel 6 dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolinieritas menunjukkan data tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing variabel independen dalam model regresi yaitu melihat nilai VIF dan nilai tolerance. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. hasil nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10. Demikian VIF tidak ada variabel independen yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinieritas yang terjadi tidak terjadi (lolos uji multikolinieritas).

3.1.3 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. Cara untuk memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data yang menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0, tidak hanya di atas atau di bawah saja, tidak membentuk pola bergelombang dan tidak berpola. Hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan pada pola gambar scatterplot dapat dilihat hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak berpola, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (times-series). uji Runs Test merupakan metode yang digunakan



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi, sebagai bagian dari statistic non-parametric dapat pula digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

Ho : residual (res_1) random (acak)

Ha : residual (res_1) tidak random (sistematis)

Hasil uji autokorelasi (Uji Runs test) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00171
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	6
Total Cases	11
Number of Runs	7
Z	.029
Asymp. Sig. (2-tailed)	.977
a. Median	

Sumber : SPSS 25 data diolah tahun 2024

Hasil uji autokorelasi menggunakan Runs Test yang terdapat pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai test adalah 0,029 dengan probabilitas 0,977 signifikan diatas 0,05 yang berarti Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random (acak) atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

3.2 Analisis Regresi Berganda

Tabel 8. Hasil Pengujian Regresi Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.365	.469		13.575	.000		
	INVESTASI SWASTA	.122	.026	.464	4.762	.002	.113	8.887
	BELANJA MODAL	-.019	.017	-.039	-1.132	.295	.906	1.104
	UPAH MINIMUM KOTA	.249	.044	.552	5.724	.001	.115	8.683

a. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA

Sumber : SPSS 25 data diolah tahun 2024

Hasil pengujian di tabel 8 diperoleh persamaan regresi yaitu $Y = 6.356 + 0,122X_1 + 0,019X_2 + 0,249X_3$ +e. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, konstanta regresi menunjukkan nilai positif sebesar 6,356,



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

artinya jika variabel lain meningkat 1%, penyerapan tenaga kerja meningkat 6,356%. Variabel investasi swasta memiliki koefisien positif sebesar 0,122, yang berarti peningkatan investasi 1% akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,122%, menunjukkan hubungan positif antara keduanya. Variabel belanja modal juga menunjukkan hubungan negatif dengan koefisien sebesar -0,019, artinya peningkatan belanja modal 1% mengurangi penyerapan tenaga kerja sebesar 0,019%. Selain itu, variabel upah minimum kota memiliki koefisien positif sebesar 0,249, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum 1% meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,249%. Hasil mengindikasikan bahwa peningkatan investasi, belanja modal, dan upah minimum kota berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun peningkatan belanja modal berkontribusi negative terhadap penyerapan tenaga kerja.

3.3 Uji Hipotesis

3.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. Keputusan penerimaan hipotesis atau penolakannya adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Pengujian Uji-t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.365	.469		13.575	.000		
	INVESTASI SWASTA	.122	.026	.464	4.762	.002	.113	8.887
	BELANJA MODAL	-.019	.017	-.039	-1.132	.295	.906	1.104
	UPAH MINIMUM KOTA	.249	.044	.552	5.724	.001	.115	8.683

a. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA

Sumber : SPSS 25 data diolah tahun 2024

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa variabel investasi swasta (X1) dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$, dan nilai t hitung $4,762 > t$ tabel 2,365, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi swasta (X1) terdapat pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

Variabel belanja modal (X2), dengan nilai signifikansi $0,295 > 0,05$, dan nilai t hitung $-1,132 < -2,365$, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal (X2) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

Sedangkan variabel upah minimum kota (X3) dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$, dan nilai t hitung $5,724 > t$ tabel 2,365, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Kota (X3) terdapat pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

3.3.2 Uji F Statistik

Uji f bertujuan untuk menguji pengaruh variable independen yang terdiri dari investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung secara bersama-sama. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variable bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% (0,05)



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Tabel 10. Hasil Uji F statistik

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.188	3	.063	309.260	.000 ^b
	Residual	.001	7	.000		
	Total	.189	10			
a. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA						
b. Predictors: (Constant), UPAH MINIMUM KOTA, BELANJA MODAL, INVESTASI SWASTA						

Sumber: SPSS 25 data diolah tahun 2024

Hasil uji diketahui hasil uji F statistik di atas menunjukkan nilai sig $0,000 < 0,05$, dan nilai f hitung $309,260 > f$ tabel 4,07. Hal ini menunjukkan; Uji F statistik menunjukkan nilai sig $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa variabel investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota terdapat pengaruh positif signifikan secara Bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja.

3.4 Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka determinasi semakin kuat, maka variabel independen dapat dinyatakan dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisien determinasi yang lebih kecil maka dapat dikatakan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen adalah terbatas.

Tabel 11. Hasil Uji R Square

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.992 ^a	.983	.976	.02112	2,651
a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Kota, Belanja Modal, Investasi Swasta					
b. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja					

Sumber : SPSS 25 data diolah tahun 2024

Regresi linier berganda menggunakan R square yang telah disesuaikan yaitu Adjusted R Square. maka output SPSS penelitian ini menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,976 atau 97,6%. Hal ini menunjukkan kontribusi pengaruh variabel independen (Investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota) mampu menjelaskan sebesar 97,6%. variabel dependen (Penyerapan Tenaga Kerja).



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pembahasan

Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2023

Secara parsial adalah bahwa Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung. Berdasarkan analisis ini terdapat kesesuaian dengan teori Harrod-domar[16] yang dalam pandangannya Investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi. Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja secara otomatis akan lebih banyak digunakan. Perkembangan penanaman modal mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan sejauh mana pembangunan berlangsung. Oleh karena itu, setiap negara berusaha menciptakan iklim yang mendukung untuk mendorong investasi, khususnya investasi swasta, yang dapat membantu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja.

Investasi swasta, baik domestik maupun asing, memiliki peluang besar di Kota Bandar Lampung disebabkan letaknya yang strategis sebagai pusat perekonomian di Sumatera Bagian Selatan. Potensi ekonomi tersebut menarik minat investor sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja, membuka lebih banyak peluang kerja bagi penduduk lokal, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Investasi swasta di Kota Bandar Lampung, baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahun, terutama pada 2018-2023 dengan kenaikan PMDN sebesar 30-57% dibandingkan 4-17% pada 2013-2017. Sebagian besar PMDN dialokasikan ke sektor tersier padat karya seperti hotel, restoran, perdagangan, dan reparasi, hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor lokal. Seperti halnya penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing juga didominasi untuk pengalokasian pada sektor tersier, khususnya pada proyek-proyek bidang jasa yang padat karya. Namun, meskipun PMA mengalami peningkatan yang lebih kecil dari PMDN, dengan peningkatan yang berkisar antara 3-25% setiap tahun, sektor ini tetap berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. Keberadaan proyek-proyek jasa ini membuka peluang kerja di berbagai bidang, mulai dari layanan pelanggan, keuangan, perdagangan, hingga sektor pariwisata, yang secara langsung dapat meningkatkan tingkat pekerjaan di kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Putri Eka Wahyuni, Kukul Arisetyawan, Lucky Rachmawati, Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah[35] yang mengatakan investasi secara positif dan signifikan memengaruhi penyerapan tenaga kerja, lalu penelitian yang dilakukan oleh Rudi Sofia Sandika, Yusni Maulida, Deny Setiawanyang mengatakan investasi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal (X2) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Belanja modal di Kota Bandar Lampung berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh pembelanjaan agregat. Belanja pemerintah (G) merupakan salah satu komponen pembelanjaan agregat. Untuk meningkatkan kegiatan perekonomian, pemerintah harus meningkatkan pembelanjaan agregat. Keynes berpendapat bahwa akumulasi modal dan laju pertumbuhan output seharusnya sejalan dengan tingkat permintaan agregat, yang jika tidak tercapai, dapat menghambat laju pertumbuhan output, yang akan berdampak juga pada penurunan kesempatan kerja. Pengeluaran pemerintah ini bertujuan untuk mengimbangi konsumsi dan investasi, sehingga mampu mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja.[22]

Belanja modal seringkali dianggap sebagai salah satu pendorong utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui belanja modal, pemerintah diharapkan dapat membangun infrastruktur, fasilitas publik, dan sektor-sektor yang dapat menciptakan kesempatan kerja.[36] Namun, berdasarkan temuan dalam penelitian ini, berpengaruh negatif tidak signifikan antara belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung periode 2013-2023 ini menggambarkan bahwa Alokasi belanja modal ternyata belum dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, dikarenakan kebijakan anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah untuk pengeluaran belanja modal masih jauh lebih rendah daripada realisasi pengeluaran untuk belanja pegawai dan belanja barang-jasa sehingga belum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

Selain itu, dalam alokasi belanja modal, terdapat kecenderungan yang kurang mengutamakan pengadaan barang atau modal yang bersifat padat karya atau yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja langsung. Pada belanja modal peralatan dan mesin lebih difokuskan pada pengadaan mesin, peralatan canggih, teknologi dan alat-alat berat atau alat-alat pengganti. Seperti halnya dalam aspek belanja modal jalan, jembatan, jaringan transportasi, dan irigasi, proyek-proyek pembangunan besar yang tidak cukup memanfaatkan tenaga kerja lokal atau tidak menyerap tenaga kerja secara optimal, karena pengadaan barang dan jasa lebih mengarah pada pembelian atau sewa mesin dan peralatan yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia. Dengan



demikian, peluang untuk menyerap tenaga kerja lokal menjadi terbatas, terutama di sektor-sektor yang mengandalkan keterampilan rendah atau menengah. Selain itu, meskipun belanja modal telah dialokasikan, anggaran tersebut sering kali tidak digunakan secara maksimal untuk menciptakan lapangan kerja.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh pada penelitian yang dilakukan oleh Rizki Kenraraswati, M. Syurya Hidayat, Yohanes Vyn Amzar[15], hasil penelitian menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Upah Minimum Kota terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2023

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Upah Minimum Kota (X1) terdapat pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Berdasarkan analisis ini terdapat kesesuaian dengan teori keynes, Upah sebagaimana yang dikemukakan dalam teorinya berpendapat bahwa pasar tenaga kerja tidak berfungsi seperti yang dijelaskan dalam teori klasik. Pekerja biasanya tergabung dalam serikat buruh yang berusaha melindungi upah agar tidak turun. Meskipun ada kemungkinan penurunan upah, Keynes berpendapat ini jarang terjadi. serikat pekerja yang melindungi dan memperjuangkan kepentingan banyak pekerja. Upaya ini termasuk menjaga upah yang wajar bagi pekerja. Serikat pekerja akan selalu menentang segala upaya untuk menurunkan upah, dapat digambarkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu tertulis pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan. Dalam konteks hukum tersebut, serikat buruh di Indonesia memiliki fungsi dan peran yang serupa dengan konsep serikat buruh dalam pandangan Keynes, yaitu sebagai organisasi yang berupaya melindungi hak-hak pekerja, termasuk dalam mempertahankan tingkat upah nominal. Dengan demikian, peningkatan upah ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat yang kemudian berdampak pada daya beli Masyarakat yang meningkat. Daya beli Masyarakat ini akan meningkatkan konsumsi yang pada gilirannya akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya. Sehingga, perusahaan harus meningkatkan faktor produksinya, salah satunya tenaga kerja sehingga akan terjadi penyerapan tenaga kerja.

Didukung dengan data angkatan kerja bekerja menurut status pekerjaan utama di Kota Bandar Lampung, lebih dari 50% atau lebih dari separuhnya memiliki status pekerjaan utama di sektor formal, yang sebagaimana hubungan antara sektor formal dan standar upah minimum lebih kuat dan langsung dibandingkan dengan sektor informal karena sektor formal umumnya lebih terstruktur dan diatur oleh hukum, sehingga standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki pengaruh langsung terhadap penetapan upah pekerja, Dimana perusahaan di sektor formal diwajibkan untuk mematuhi ketentuan UMK yang berlaku, yang berarti setiap pekerja di sektor ini harus menerima upah yang tidak boleh lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjamin pekerja sektor formal mendapatkan upah yang sesuai dengan regulasi, memberikan kestabilan ekonomi, serta memfasilitasi peningkatan daya beli.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagas Martimbang[38], yang berjudul Analisis Pengaruh Pdrb, Belanja Modal, Pendidikan, Dan UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2015, yang mengatakan terdapat adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Modal dan Upah Minimum Kota Secara Bersama-Sama Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota memberikan pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan diketahui hasil uji F statistik di atas menunjukkan nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$, dan nilai $f \text{ hitung } 309,260 > f \text{ tabel } 4,07$. Hal ini menunjukkan; Uji F statistik menunjukkan nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa variabel investasi swasta, belanja modal dan upah minimum kota terdapat pengaruh positif signifikan secara Bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja.

Investasi Swasta, Belanja Modal dan Upah Minimum Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dalam perspektif Ekonomi Islam

Dalam agama Islam, kebutuhan dasar setiap individu dijamin pemenuhannya secara menyeluruh, mencakup kebutuhan barang dan jasa, dalam hal ini diperlukannya kerja sama antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting untuk menetapkan kebijakan yang memastikan kebutuhan ini terpenuhi, termasuk dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang mampu bekerja. Tanggung jawab ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa

“Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhdap urusan rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk menetapkan mekanisme yang memastikan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah dengan mewajibkan setiap warganya bekerja sesuai perintah Allah SWT, serta memberikan dan mengoptimalkan fasilitas dan lapangan kerja, sehingga setiap orang dapat memperoleh pekerjaan. Dalam sudut pandang ekonomi Islam, penanaman modal dan pengeluaran pemerintah khususnya dalam hal belanja modal, termasuk dalam kategori fiqh muamalah, di mana ajaran Islam menekankan bahwa sumber daya (harta) tidak seharusnya hanya disimpan, tetapi harus dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat bagi orang lain.[39] Sebagai upaya untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berusaha meningkatkan investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Peningkatan investasi ini diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran di kota tersebut.

Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai kebijakan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk distribusi yang merata. Islam tidak menganjurkan akumulasi kekayaan yang berlebihan, melainkan mendorong pengeluaran yang digunakan untuk kesejahteraan umat. Dalam hal ini, Islam mengarahkan agar kekayaan yang dimiliki digunakan untuk kebaikan bersama, memperbaiki kondisi sosial ekonomi, dan menolong yang membutuhkan.[40] Salah satu ayat yang membahas mengenai pengeluaran dalam QS Al-Hasr ayat 7[4], di mana Allah SWT berfirman:

رَسُولُهُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللِّرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ مَآ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ تَهْوَأَ كُمْ عَنْهُ فَإِنَّا لَنَسِيبُ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” QS Al-Hasr ayat 7[4]

Ayat ini menjelaskan Ekonomi Islam menentang penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan menggaris bawahi prinsip keadilan serta persaudaraan dalam distribusi harta. Kekayaan harus tersebar ke seluruh masyarakat, bukan terpusat pada kelompok tertentu. Kebijakan distribusi dalam Islam bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada satu golongan, sekaligus mendorong terciptanya keadilan sosial. Pemerintah diharuskan memastikan sistem ekonomi, hukum, dan sosial berjalan adil agar kekayaan dapat tersebar merata.[41] pendapat sebagian besar filsafat ekonomi mengenai pengeluaran adalah dengan mengedarkan surplus kekayaan serta memastikan bahwa harta yang dikeluarkan pemerintah didistribusikan secara merata. Sesuai dengan sumber penerimaan anggaran yang diterima oleh pemerintah, maka dapat disalurkan salah satunya untuk belanja modal.[40]

Disisi lain Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan upah juga telah diatur didalamnya. Dimana upah atau ujah, yang diperoleh melalui akad Ijarah. Menurut pendapat ulama Hanifyah, Ijarah merupakan transaksi atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan yang disepakati, yang diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, upah (ujrah) merupakan kompensasi atas jasa yang diberikan oleh tenaga kerja. Dalam perjanjian mengenai upah, kedua pihak diingatkan untuk berlaku jujur dan adil, sehingga tidak ada penindasan atau kerugian bagi salah satu pihak.[42] Dalam Al-Quran upah didefinisikan secara menyeluruh dalam QS At-Taubah ayat 105[4], yang artinya :

هَادَةً وَقَلِّ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴿١٠٥﴾ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah : Bekerjalah Kamu, Maka Allah Dan Rasul-Nya Serta OrangOrang Mukmin Akan Melihat Pekerjaanmu Itu, Dan Kamu Akan Dikembalikan Kepada (Allah) Yang Mengetahui Akan Yang Ghaib Dan Yang Nyata, Lalu Berikanlah-Nya Kepada Kamu Apa Yang Telah Kamu Kerjakan” QS At-Taubah ayat 105[4]

Quraish Shihab dalam bukunya, Tafsir Al-Misbah menjelaskan, QS. At Taubah ayat 105 sebagai berikut: “Bekerjalah kamu demi karena Allah semata dengan aneka amal yang sholeh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu



itu.” Ganjaran yang dimaksud adalah upah atau kompensasi[43] maka, jika seseorang bekerja dengan niat ikhlas karena Allah (amal shaleh), ia akan mendapatkan balasan baik di dunia, berupa upah, maupun di akhirat, berupa pahala yang berlipat ganda. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upah dalam Islam memiliki dua aspek yaitu dunia dan akhirat. Dalam hal ini, upah atau kompensasi yang diberikan atas jasa tenaga kerja disebut dengan upah.

Pada dasarnya upah yang diterima para pekerja dalam segala industri berdasarkan peraturan pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2018. Upah Minimum Kota Pasal 36 Ayat (1) “Setiap perusahaan wajib melaksanakan upah minimum kota (UMK) sebagai jaring pengaman dasar pembayaran upah”. lalu dijelaskan pula dalam Pasal 36 Ayat (4) “perusahaan dilarang membuat perjanjian/kesepakatan membayar upah dibawah upah minimum”.

Berdasarkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam[44], penetapan upah dilakukan melalui negosiasi yang melibatkan pekerja, majikan, dan negara. Dalam proses pengambilan keputusan mengenai upah harus dipertimbangkan dengan adil, yakni cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja tanpa membebani majikan secara berlebihan. Untuk memastikan keadilan ini, pemerintah perlu menetapkan tingkat upah minimum yang mencukupi, dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja secara adil, dan memastikan bahwa tingkat upah ini tidak akan turun dalam kondisi apapun. Upah minimum ini juga harus ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Sementara itu, tingkat upah maksimum akan disesuaikan dengan kontribusi tenaga kerja dan dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan kondisi pasar.

IV. KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi swasta dan upah minimum kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung, sementara belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara bersama-sama, ketiga variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi dan upah minimum memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial, dengan negara bertanggung jawab menyediakan kebijakan yang mendukung lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan penetapan upah minimum yang adil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata (falah).

REFERENSI

- [1] D. Setiawan, Y. Maulida, and R. S. Sandika, “Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan.” Riau University, 2014.
- [2] R. N. Pramesthi, “Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten trenggalek,” *J. Pendidik. Ekon.*, vol. 1, no. 3, 2013.
- [3] S. Nurhayati, *Akuntansi syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba, 2009.
- [4] L. P. M. Al-Quran, “Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahan,” *Jakarta: Pantja Cemerlang*, 2010.
- [5] A. M. Al-Maraghi, “Tafsir AL-Maraghi Juz XXI, terj,” *Bahrin Abubakar, al.. Semarang PT Karya Toha Putra Semarang*, 1992.
- [6] L. L. I. N. M. Yasa, “PENGARUH INVESTASI, TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA, DAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BALI”.
- [7] N. G. Mankiw, “Makroekonomi edisi keenam (terjemahan),” *Jakarta PT. gelora Aksara Pratama*, 2007.
- [8] S. Sukirno, “Mikro Ekonomi Teori Pengantar,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 202),” 2002.
- [9] B. D. Dharma and S. Djohan, “Pengaruh investasi dan inflasi terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda,” *Kinerja J. Ekon. dan Manaj.*, vol. 12, no. 1, 2015.
- [10] U. D. Hananto, “Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,” *Masal. Huk.*, vol. 40, no. 2, pp. 202–212, 2011.
- [11] S. W. Mustafa, “Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Dikota Palopo,” *J. Inst. Shariah Financ.*, vol. 2, pp. 30–39, 2019.
- [12] M. Sakti, M. Saleh, and J. Juliansyah, “Pengaruh produk domestik regional bruto dan investasi swasta serta upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja,” *Kinerja J. Ekon. dan Manaj.*, vol. 18, no. 4, pp. 689–694, 2021.
- [13] I. Subiyanto and A. Halim, *Analisis investasi: belanja modal: sektor publik-pemerintah daerah*. Unit Penerbitan dan Percetakan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yayasan ..., 2008.
- [14] D. Fatihudin, “Kontribusi Private Investment Dan Belanja Modal Pemerintah Terhadap Nilai Tambah



- Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Kab/Kota Hight Economic Di Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya, Kota Kediri, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik),” *AKRUAL J. Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 90–104, 2012.
- [15] R. Kenraraswati, M. S. Hidayat, and Y. V. Amzar, “Pengaruh penanaman modal dalam negeri, upah minimum dan belanja modal terhadap daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi,” *J. Paradig. Ekon.*, vol. 14, no. 1, pp. 37–44, 2019.
- [16] S. Mulyadi, “Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan,” 2006.
- [17] N. K. Taufan and A. Y. Mafruhah, “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2021,” in *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2022, pp. 415–422.
- [18] S. Sukirno, “Pengantar teori makroekonomi,” 1981.
- [19] H. F. Noor, “Economy Public (Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat), cet. pertama.” Jakarta: PT Indeks, 2005.
- [20] N. Annisa, “Analisis Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat,” *Integr. J. Inovasi, Teknol. Ter. dan Litbang*, vol. 2, no. 1, pp. 55–70, 2023.
- [21] S. Sukirno, “Makro ekonomi teori pengantar edisi ketiga,” *Rajawali Pers, Jakarta*, vol. 90, 2011.
- [22] L. Hakim and A. Wijayanti, “Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali),” *J. Ilm. Mhs. FEB*, vol. 3, no. 1, 2014.
- [23] H. F. Noor, “Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat,” *Jakarta PT Indeks*, 2009.
- [24] G. U. Saefurrahman, T. Suryanto, and R. E. Wulandari, “Pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan,” *Islam. Econ. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–18, 2017.
- [25] M. Haroon and M. Nasr, “Role of private investment in economic development of Pakistan,” *Int. Rev. Bus. Res. Pap.*, vol. 7, no. 1, pp. 420–439, 2011.
- [26] D. Salvatore, “Ekonomi Internasional, Salemba Empat.” Jakarta: Hartley Keith, 2011.
- [27] I. Pirda, T. Militina, and A. Wijaya, “Pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di propinsi kalimantan timur,” *J. Ilmu Ekon. Mulawarman*, vol. 3, no. 4, 2018.
- [28] I. Bastian, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Pusat Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, 2001.
- [29] S. E. Syaiful, “Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan,” *J. Akuntansi. Available http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf*, 2006.
- [30] M. N. Gregory, “Makroekonomi (edisi keenam),” *Jakarta: Gramedia Pustaka*, 2006.
- [31] A. N. Nadhiroh, *Pemberian Upah Pekerja/Buruh Yang Adil Dan Layak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Sebuah Analisis Kritis pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan)*. Guepedia, 2020.
- [32] P. Sugiyono, “Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian Evaluasi),” *Bandung Alf. Cv*, 2016.
- [33] M. I. Hasan, “Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya.” Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- [34] M. P. Tika, “Metodologi riset bisnis.” Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- [35] D. P. E. Wahyuni, K. Arisetyawan, L. Rachmawati, and L. W. P. Fisabilillah, “Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Besar di Kabupaten Sidoarjo,” *J. Simki Econ.*, vol. 7, no. 1, pp. 63–71, 2024.
- [36] M. P. Todaro and S. C. Smith, “Pembangunan ekonomi di dunia ketiga Jilid 1,” *Ed. Kedelapan, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Jakarta Penerbit Erlangga*, 2000.
- [37] I. Wati, “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT,” *J. Pembang. dan Pemerataan*, vol. 11, no. 4.
- [38] B. Martimbang, “Analisis Pengaruh Pdrb, Belanja Modal, Pendidikan, dan UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2015,” 2017.
- [39] H. A. Bagraf, “DETERMINAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI INDONESIA DITINJAU DARI PARADGIMA FIQH MUAMALAH,” *JBT (JURNAL BISNIS dan Teknol.*, vol. 11, no. 1, pp. 5–16, 2024.
- [40] A. A. H. At-Tariqi, “Ekonomi Islam: Prinsip, dasar dan tujuan,” *Yogyakarta Magistra Insa. Press Azhar*, 2004.
- [41] A. L. R. Fikri, M. Yasin, and A. Jupri, “Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7: Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” in *Proceeding: International Conference on*



- Islamic Studies (ICIS) IAIN Ponorogo*, 2019, pp. 53–71.
- [42] A. Nafila and F. Faqih, “Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah,” *IQTISODINA*, vol. 4, no. 2, pp. 1–21, 2021.
- [43] M. Q. Shihab, “Tafsir al-misbah,” *Jakarta lentera hati*, vol. 2, pp. 52–54, 2002.
- [44] S. D. Yusuf, “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Ulum*, vol. 10, no. 2, pp. 309–324, 2010.



DOI: 10.52362/jisamar.v9i1.1704

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).